Jurnal Educatio
Volume 7, No. 3, 2021, pp. 1270-1279
DOI: 10.31949/educatio.v7i3.1403

P-ISSN 2459-9522
E-ISSN 2548-6756

Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Upaya Internalisasi Nilai Toleransi Dalam Mencegah Potensi Radikalisme di Universitas Pendidikan Indonesia

Yan Mahdi Muhamad*, Suwarma Al Muchtar, Leni Anggraeni
Universitas Pendidikan Indonesia
*yan@upi.edu

ABSTRACT

The trend of intolerance and radical activism in Indonesia from year to year does not seem to end, even though the data has fluctuated the phenomenon of intolerance and radicalism to this day is still a serious matter that threatens the integrity of the Indonesian nation. One of the factors that encourage the escalation of radical acts and terrorism is the recruitment of radicalism organizations targeting educated circles, namely students in universities. The purpose of this paper is to reveal the efforts by Indonesian University Of Education in carrying out the process of internalizing the value of tolerance in preventing the potential for radicalism in universities. The author uses a qualitative approach and case study methods in this study, while the analysis used is descriptive qualitative which is carried out in stages and is interrelated between data reduction, data presentation, conclusion drawing, and verification. This study shows that efforts to internalize the value of tolerance can be pursued through Civic Education which has a strategic role as a means of inculcating Indonesian values (tolerance, mutual cooperation, unity, etc.), respect for human rights, and multicultural education. While the obstacles encountered in the process of internalizing the value of tolerance include the weak learning process that builds critical thinking skills, the weak national and religious insight of students, and the transition phase among students in finding their identity or commonly referred to as the identity crisis phase.
***Keywords**: civic education; tolerance; prevention, radicalism.*

ABSTRAK

Tren intoleransi dan aktivisme radikal di Indonesia dari tahun ke tahun tampaknya tidak juga menemui akhir, walaupun datanya mengalami fluktuasi fenomena intoleransi dan radikalisme hingga hari ini masih menjadi perkara serius yang mengancam stabilitas nasional. Salah satu faktor yang mendorong terjadinya eskalasi aksi radikal dan terorisme adalah adanya rekrutmen organisasi radikalisme yang menyasar kalangan terdidik yaitu mahasiswa di lingkungan perguruan tinggi. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengungkapkan upaya Universitas Pendidikan Indonesia dalam melaksanakan proses internalisasi nilai toleransi dalam mencegah potensi radikalisme di perguruan tinggi. Penulis menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus dalam penelitian ini, adapun analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang dilakukan secara berjenjang dan saling terkait antara reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan verifikasi. Penelitian ini menunjukkan bahwasanya upaya internalisasi nilai toleransi dapat ditempuh melalui Pendidikan Kewarganegaraan yang memiliki peran strategis sebagai sarana penanaman nilia-nilai ke-Indonesiaan (toleransi, gotong royong, persatuan dll), penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan pendidikan multikultural. Sedangkan kendala yang ditemui dalam proses internalisasi nilai toleransi diantaranya adalah lemahnya proses pembelajaran yang membangun kemampuan berfikir kritis, lemahnya wawasan kebangsaan dan keagamaan mahasiswa, dan fase transisi kalangan mahasiswa dalam menemukan jatidiri mereka atau biasa disebut sebagai fase krisis identitas.
Kata Kunci: pendidikan kewarganegaraan; toleransi; pencegahan; radikalisme.

Submitted Aug 08, 2021 | Revised Aug 31, 2021 | Accepted Sep 16, 2021

Pendahuluan

Masa reformasi membuka jalan bagi berbagai ungkapan dan ekspresi terkait kebebasan politik dan suasana demokratisasi. Kebebasan berpendapat, berserikat, dan berekspresi yang digaungkan pada masa reformasi turut mendorong bangkitnya kembali gerakan politik Islam dalam skala besar di Indonesia. Tidak sekadar dalam bidang politik, mayarakat dengan semangat keislaman juga turut membangkitkan kehidupan sosial keagamaan dengan melahirkan berbagai ormas Islam yang memiliki ciri dan tujuan pendirian yang beragam. Tidak terkecuali orang-orang dengan paham keislaman yang

konservatif dan berhaluan keras juga turut mendirikan berbagai organisasi dan kelompok keagamaan Islam.

Minimnya pengawasan dan aturan yang longgar terhadap perkembangan gerakan organisasi dan kelompok Islam yang bersifat keras dan intoleran pada akhirnya akan menimbulkan problematika di kemudian hari. Menurut hasil survei yang dilakukan oleh Wahid Institute (2020) di dapati data bahwa fenomena intoleransi di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang semulanya 46% sekarang ini menjadi 54%. Tren peningkatan ini dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain: persaingan politik, dakwah (ceramah) yang bermuatan ujaran kebencian, dan unggahan ujaran kebencian di berbagai platform media sosial (CNN, 2020)

Kebencian terhadap sentimen agama mungkin bisa menjadi titik awal kerawanan sosial yang menimbulkan berbagai aksi aksi teror yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Fenomena kekerasan beragama umumnya diawali dengan pemahaman eksklusif terhadap doktrin agama, kemudian membentuk sikap sosial yang intoleran, yang mewujud dalam sifat kekerasan, dan diiringi dengan aksi teror dan radikal untuk melawan berbagai kelompok yang pada akhirnya menimbulkan rasa permusuhan dan kebencian antar kelompok.

Catatan sejarah perkembangan gerakan Islam menunjukkan bahwa terdapat relevansi yang kuat diantara mobilisasi gerakan radikal dengan perubahan pola sosial politik. Gerakan Darul Islam, yang lahir dan ditindas dalam waktu singkat pada masa awal kemerdekaan Indonesia, mengilhami penyebaran ide-ide Islam "anti-negara" (van Bruinessen, 2002).

Di Indonesia sendiri meningkatnya intoleransi dan radikalisme dapat disimpulkan turut di iringi dengan peningkatan aksi terorisme. Setidaknya dalam pemberitaan sejak 5 Juli 2016 terdapat beberapa aksi terorisme yang terjadi seperti, serangan bom kedai kopi Starbucks, bioskop Djakarta Teater pada (14/01/2016), Pada 5 Juli 2016, sehari jelang Idul Fitri, terjadi bom bunuh diri di Mapolresta Surakarta. Ledakan ini menewaskan pelaku atas nama Nur Rohman dan melukai seorang anggota polisi. lalu serangan sebuah bom di Kampung Melayu pada (24/05/2017), kemudian bom bunuh diri terjadi di tiga gereja di Surabaya, Jawa Timur dengan waktu berdekatan pada Minggu (13/05/2018). Di hari yang sama sekitar pukul 21.00 WIB bom bunuh diri terjadi di Rusun Wonocolo, Sidoarjo. Keempat ledakan tersebut memakan korban jiwa sebanyak 17 orang (L. A. 2018. " Azanella, 2018).

Aksi radikal terorisme terbaru terjadi di tahun 2021. Suatu peristiwa yang cukup memilukan yakni serangan bom yang terjadi di depan gereja katedral Kota Makassar pada 28 April 2021. Dari berbagai informasi yang beredar ledakan bom tersebut berasal dari dua pengendara motor yang berusaha masuk ke halaman gereja yang pada saat itu merupakan hari peribadatan para jemaat geraja. Diduga kuat peristiwa ini merupakan suatu upaya bom bunuh diri yang dilakukan oleh sepasang suami istri. "Akibat kejadian itu, dua orang yang diduga pelaku dilaporkan tewas, serta 20 orang terdiri dari warga, petugas keamanan gereja, dan jemaat mengalami luka akibat ledakan" (Azanella, 2021)

Selanjutnya hanya berselang dua hari setelah peristiwa ledakan bom di Kota Makassar, pada Rabu tanggal 31 Maret 2021 kembali terjadi aksi teror yang pada kali ini berlokasi di Mabes Polri. Dalam video amatir dan rekaman CCTV yang disiarkan Kompas TV memperlihatkan terduga teroris berjalan dari arah pintu masuk pejalan kaki atau pintu belakang Mabes Polri. Kemudia terduga teroris melepaskan beberapa tembakan ke arah polisi yang berjaga di pos pintu masuk, lalu polisi pun membalasnya hingga pelaku teror pada akhirnya mesti dilumpuhkan karena aksi terornya yang dapat mengancam nyawa orang-orang di sekitar lokasi kejadian.

Tindakan teroris tidak lebih dari kejahatan terorganisir, hal ini terlihat jelas dari keberadaan staf dan penyandang dana di lapangan. Selain itu, aksi terorisme adalah kejahatan transnasional yang mematikan. Kejahatan yang dilakukan merupakan kejahatan luar biasa, dampak yang paling serius antara lain dapat membahayakan perdamaian nasional dan internasional (Anggraeni et al., 2019). Hasil penelitian Center for Religious and Intercultural Studies (CRCS) 2017 menngungkapkan bahwa kelompok radikal telah berhasil menyebarkan ideologi radikal melalui berbagai pola baru, seperti

memanfaatkan pemikiran masyarakat yang permisif terhadap ideologi radikal di saat perkara kesenjangan, kemiskinan, pengangguran dan keterbelakangan dirasa membelit kehidupan mereka. Melalui cara tersebut kelompok radikal berupaya menciptakan pola baru dalam mengembangkan jaringan kelompoknya (Bagir, 2018).

Terbentuknya sikap intoleran pada individu pada gilirannya dapat menjadi pintu gerbang pemahaman ideologi radikal. Selain itu, tidak menutup kemungkinan bahwa individu yang terpapar ideologi radikal dapat secara sadar setuju untuk melakukan aksi teror. Hal tersebut sejalan dengan hasil survei Pusat Penelitian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta di tahun 2017 yang mendapati hasil bahwa 34,3% anak muda yang disurvei setuju terhadap aksi jihad untuk melawan kelompok non-Islam. Di saat yang sama, antara lain, sikap intoleran dapat memicu terjadinya kekerasan agama yang dapat berkembang menjadi aksi terorisme (Faela Nisa, 2018)

Perkembangan jaringan ideologi radikal telah menarik banyak perhatian, menurut berbagai penelitian, anak muda merupakan kelompok yang paling rentan terhadap ideologi radikalisme, sehingga pada akhirnya tertarik untuk bergabung dengan kelompok ini. Hal ini bisa dimaklumi, karena organisasi radikalisme meyakini bahwa anak muda, terutama pelajar sekolah menengah dan mahasiswa, adalah kelompok masyarakat yang mengalami krisis identitas dan perlu mengambil tindakan nyata untuk menemukan jati dirinya. Di sisi lain mereka juga dipandang lugu dalam memaknai realitas dan perubahan sosial yang berlaku. Oleh karena itu cukup terbuka dan dapat menerima dengan baik berbagai input dan informasi berkaitan dengan gerakan keagamaaan yang dipandang ideal sekaligus menginspirasi mereka untuk turut terlibat dalam mewujudkan cita-cita dari paham-paham radikal berbalut jubah agama tersebut.

Lahirnya fenomena radikalisme tidaklah terlepas dari adanya upaya polarisasi dari kondisi masyarakat Indonesia yang beragam. Polarisasi tentu akan memunculkan sentimen anti terhadap keberagaman budaya dan melahirkan pandangan yang sempit atas doktrin, teologi mapupun ideologi. Radikalisme yang berkembang di Indonesia, salah satunya disebabkan oleh adanya beberapa kelompok masyarakat yang tidak mampu (gagal) dalam memadukan nilai-nilai nasionalisme yang bersendikan akan nilai pluralitas. Radikalisme sebagai sebuah ideologi amatlah rentan mempengaruhi pola pikir generasi muda, apabila di saat yang bersamaan nilai yang diyakini itu tersisip atau bahkan masuk dalam pelajaran di persekolahan (Suryani, 2017)

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) juga melaporkan temuannya mengenai fenomena radikalisme. Berdasarkan data BNPT pada tahun 2017, sebanyak 39% pelajar di 15 provinsi Indonesia menyatakan minatnya pada radikalisme. Hasil survei tersebut membuat masyarakat semakin curiga bahwa generasi muda menjadi sasaran penyebaran paham (ideologi) radikal dan kampus dijadikan lokasi utama mengembangkan gerakan radikalisme. Pendidikan merupakan sektor kunci yang memiliki peranan penting sebagai upaya preventif menangkal ancaman radikalisme di perguruan tinggi. Dengan menggunakan dan mengoptimalkan setiap lini pembelajaran departemen pendidikan, kita dapat meningkatkan, menginisiasi, memperkuat dan menyempurnakan proses pendidikan dasar, yaitu pendidikan nilai kepribadian yang penuh dengan nilai-nilai kehidupan dan karakter bangsa.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam menangkal potensi radikalisme di perguruan tinggi adalah dengan memanfaatkan ruang pendidikan melalui mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sebagai wadah untuk menginternalisasikan nilai-nilai kebangsaan, khususnya nilai toleransi di perguruan tinggi. Nilai toleransi dapat menjadi aset karakter yang berharga bagi individu untuk menghindari ancaman radikalisme dan fundamentalisme agama yang dapat mengancam keutuhan dan persatuan bangsa. Selain itu, mengingat keberadaan mahasiswa yang dijadikan target sasaran kelompok radikal terorisme dalam mengembangkan kelompoknya, maka internalisasi nilai-nilai toleransi dapat menjadi upaya yang tepat dalam proses de-rooting nilai dan karakter dari seorang mahasiswa di perguruan tinggi.

Menurut Branson Civic Education atau Pendidikan Kewarganegaraan dalam membentuk warga negara yang baik berperan dalam mengembangkan tiga kompetensi yang sepatutnya dikuasai oleh setiap warga negara, ketiga kompetensi tersebut yaitu warga negara yang bepengetahuan *(civics knowledge),* warga negara yang cakap *(civics skill)* dan warga negara yang berkarakter *(civics dispositions)* (Winataputra & Budimansyah, 2007).

Ketiga kompetensi tersebut dijiwai oleh sumber nilai yang sama yaitu bersumber pada nilai-nilai Pancasila sebagai ruh dari bangsa Indonesia. Apabila ketiga kompetensi tersebut telah melekat dalam jiwa dan kepribadian seorang warga negara, maka secara langsung ataupun tidak warga negara tersebut merupakan seorang individu yang kompeten, memiliki komitmen, memiliki kepercayaan diri dan toleran.

Nilai toleransi menjadi suatu hal yang esensial bagi kehidupan bangsa indonesias sebab sikap dan perilaku toleran yang dapat dimaknai sebagai cerminan perilaku yang dapat menerima perbedaan dan keberagaman akan mampu menumbuhkan pergaulan hidup bermasyarakat yang harmonis dan saling menghormati satu sama lain. Selain itu sikap toleransi tentunya akan menghindarkan bangsa indonesia dari ancaman radikalisme dan perilaku intoleran yang berpotensi menimbulkan perpecahan dan permusuhan antar sesama anak bangsa.

Sikap yang mencerminkan perilaku toleransi adalah suatu kehendak dan kemampuan yang dilakukan secara sadar oleh tiap pribadi individu dan masyarakat secara umum untuk senantiasa berlaku adil dan bijak terhadap hak seseorang dan atau kelompok minoritas yang mana mereka hidup di dalam berbagai produk hukum dan peraturan yang cenderung lebih banyak dirumuskan oleh kelompok atau golongan mayoritas (Sutton, 2006).

Pembelajaran *Civic Education* (Pendidikan Kewarganegaraan) di tingkat perguruan tinggi, merupakan sarana strategis dalam meningkatkan kesadaran komprehensif mahasiswa terhadap masalah bangsa. Pada gilirannya hal itu akan berujung pada keterlibatan (partisipasi efektif) dan tumbuhnya kesadaran tanggung jawab untuk memperbaiki kualitas hidup sosial dan politik secara keseluruhan (Pahlevi, 2017). Namun, dalam proses penerapan nilai-nilai kebangsaan, khususnya internalisasi nilai toleransi, keberadaan PKn seolah-olah mengalami stagnasi, hanya bersifat formal dan pendidikan nilai yang terdapat di dalamnya belumlah dijiwai sepenuhnya oleh peserta didik. Selain itu, hingga saat ini pelaksanaan PKn di perguruan tinggi tampaknya belum memberikan hasil konkret dalam mendukung upaya menangkal gerakan radikalisme di perguruan tinggi.

Masyarakat Indonesia masih berharap dapat menggunakan pendidikan tinggi sebagai tempat untuk mengamalkan dan mendidik putra putri mereka agar menjadi intelektual yang berilmu dan terpuji. Ironisnya, tidak ada universitas yang bisa menjamin alumnusnya akan memiliki karakter dan kepribadian yang baik. Di samping, misi pendidikan tinggi yang memuat aspek pengajaran, penelitian dan penerapan ilmu pengetahuan. Sebagaimana dikatakan oleh Arthur secara khusus, pengembangan karakter tidak dianggap sebagai tugas universitas. Oleh karena itu, penyelenggaraan pendidikan kepribadian terkait dengan internalisasi nilai toleransi perguruan tinggi menghadapi hambatan tersendiri khususnya dalam upaya menangkal potensi radikalisme. Perguruan tinggi harus menyadari bahwa kerjasama dengan stakeholders (dalam hal ini orang tua dan masyarakat sekitar) sangatlah dbutuhkan (Syukri, 2009).

Begitu pula peran pemerintah melalui BNPT dan kepolisian serta instansi terkait tak kalah pentingnya dalam merumuskan dan melaksanakan rangkaian upaya internalisasi nilai toleransi dalam menangkal potensi radikalisme di perguruan tinggi. Meskipun berbagai strategi dan metode yang diterapkan oleh masing-masing lembaga berbeda, namun memiliki tujuan yang sama untuk mendorong dan memotivasi masyarakat, khususnya mahasiswa agar dapat mengembangkan keterampilan moral pribadi, terutama sikap dan perilaku yang toleran, di bawah bayang-bayang gelap ancaman radikalisme di perguruan tinggi Indonesia.

Ancaman gerakan radikalisme dan terorisme telah dengan jelas menyasar kalangan mahasiswa sebagai kelompok terpelajar (Humaizi et al., 2018). Temuan ini dperkuat dengan terungkapnya beberapa mahasiswa dan oknum sivitas akademika yang jelas-jelas merupakan bagian dari kelompok radikal. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Zuly Qodir Kaum muda dengan kondisi mental yang cendrung labill sangatlah berpotensi terpengaruh oleh paham radikalisme yang kerap kali mengkaitkannya dengan suatu ajaran tertentu hal ini dibuktikan dengan adanya berbagai tindak intoleran dan radikal yang dilakukan oleh kaum muda (Qodir, 2018).

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki fokus kajian pada pemberdayaan organisasi masyarakat sipil dan ancaman gerakan radikalisme di kalangan pemuda secara umum sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Ichwayudi (2020) yang memiliki fokus kajian upaya dialog lintas agama dalam mengantisipasi ancaman gerakan radikalisme di kalangan pemuda. Penelitian ini secara khusus memiliki fokus kajian pada upaya pencegahan potensi radikalisme melalui Pendidikan Kewarganegraan di lingkungan perguruan tinggi sebagai sarana internalisasi nilai toleransi di kalangan mahasiswa.

Berdasarkan kompleksitas persoalan yang telah dipaparkan di atas berkenaan dengan banyaknya kejadian kasus intoleransi di ikuti perkembangan gerakan radikalisme yang mengancam kerukunan dan kerharmonisan hidup masyarakat Indonesia, tulisan ini memiliki tujuan untuk menguraikan dan memaparkan bagaimana peranan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sebagai upaya internalisasi nilai toleransi dalam mencegah potensi radikalisme di Universitas Pendidikan Indonesia.

Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan metode penelitian yang diterapkan adalah studi kasus fenomenologi berkenaan dengan pelaksanaan internalisasi nilai toleransi di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI). Penelitian ini diarahkan untuk mengeksplorasi dan mengungkap hambatan internalisasi, hambatan implementasi internalisasi yang diterapkan UPI untuk meningkatkan perilaku toleran dari mahasiswa dalam rangka mencegah potensi radikalisme di lingkungan kampus. Perilaku toleransi yaitu bagaimana mahasiswa bisa saling menghormati keberagaman, menghargai perbedaan, menjalin persaudaraan dan rasa persatuan serta kesatuan antar berbagai kelompok dan kalangan yang ada di lingkungan kampus.

Dalam konteks kajian sosial dan fenomenologi pendekatan kualitatif sangat sesuai dalam mengakomodir penelitian kali ini. Karena memiliki fokus kajian pada proses internalisasi nilai toleransi yang dlikukan oleh UPI dalam menyikapi fenomena radikalisme di lingkup perguruan tinggi khususnya terkait hambatan dan upayanya dalam mencegah potensi radikalisme di perguruan tinggi. Penelitian ini bersifat alamiah dan induktif (Bogdan & Biklen, 1998). Seperti yang dikemukakan Bogdan dan Taylor yang dikuti oleh Moeloeng mengenai kualitatif, prosedur penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Peneliti tidak mengisolasikan subjek penelitian atau individu kedalam variabel atau hipotesis, tetapi memandangnya sebagai bagian dari sesuatu keutuhan, yakni manusia yang memiliki kesadaran dan kehendak (Moleong, 2010).

Dalam penelitian kualitatif kealamiahan latar penelitian juga diperlukan agar peneliti dapat menafsirkan proes internalisasi nilai toleransi di UPI yang apa adanya sesuai dengan data dan fakta yang terdapat di lapangan. Kemudian anlisis data yang diterapkan pada penelitian ini dilakukan secara berjenjang dan saling terkait antara reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan verifikasi. Data primer pada penelitian ini diperoleh melalui proses wawancara bersama delapan orang mahasiswa UPI dari berbagai fakultas baik dari fakultas kelimuan sosio humaniora maupun dari fakultas kelimuan eksakta. kemudian peneliti juga melakukan wawancara dengan salah satu dosen mata kuliah PKn di UPI dan dengan salah seorang pengamat sekaligus peneliti gerakan radikalisme di Indonesia. Selain itu peneliti juga melakukan tinjauan literasi kepustakaan, studi dokumentasi, dan obesrvasi lapangan

sebagai upaya memperoleh data sekunder yang dapat mendukung hasil penelitian yang jauh lebih mendalam dan komprehensif.

Hasil dan Pembahasan

Internalisasi nilai tolernasi dan nilai-nilai ke-Indonesiaan lainnya merupakan landasan fundamen yang dapat menjadi penyokong setiap insan warga negara termasuk mahasiswa di antaranya untuk dapat menghadapi dan melindungi diri dari berbagai gangguan, ancaman, hamabatan, dan tantangan dari berbagai pihak baik internal maupun eksternal yang silih menerpa bangsa Indonesia. Tidak terkecuali ancaman radikal terorisme yang telah telah terjadi berulang kali. Sampai dengan hari ini, ancaman tersebut masih nyata adanya tersembunyi di berbagai kelompok dan organisasi tidak terkecuali di dalam organisasi dan kelompok-kelompok kemahasiswaan yang terdapat di UPI.

Dibutuhkan upaya kongkrit untuk membendung dan mencegah adanya potensi radikalisme di kalangan mahasiswa UPI. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui penguatan dan optimalisasi proses Pendidikan Kewarganegraan di kampus sebagai sarana internalisasi nilai toleransi.

Perkuliahan PKn menjadi sarana strategis dalam upaya penanaman nilai dan pembentukan karakter toleran terhadap mahasiswa agar mampu menjalani peranannya sebagai warga negara yang baik, cakap, sekaligus terampil di tengah berbagai ancaman nasional yang ada, salah satu ancaman tersebut yaitu fenomena radikalisme dan terorisme. Sebagaimana Ubaedillah & Abdul menyampaikan bahwasanya PKn sebagai sarana pembangunan karakter bangsa memiliki beberapa tujuan yaitut (1) Membentuk kecapakan partisipatif warga negara yang bermutu dan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, (2) Menjadikan warga negara Indonesia yang cerdas, aktif, kritis dan demokratis, namun tetap memiliki komitmen menjaga persatuan dan integritas bangsa, (3) Mengembangkan kultur demokrasi yang berkeadaban, yaitu kebebasan, persamaan, toleransi dan tanggungjawab (Ubaedillah & Abdul, 2013).

Perkuliahan PKn merupakan sarana yang tepat sebagai media dalam menginternalisasikan nilai toleransi terhadap mahasiswa sebab pembelajaran PKn dapat dimaknai sebagai usaha untuk mempersiapkan angkatan muda (siswa dan mahasiswa) untuk menjadi warga negara yang berpengetahuan, cakap dan menguasasi nilai-nilai moral dan karakter yang dibutuhkan untuk dapat berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat (Samsuri, 2011). Maka dari itu tepat kiranya perkuliahan Pendidikan Kewarganegaraan dijadikan sebagai media dalam menginternalisasikan nilai toleransi sekaligus seperangkat nilai moral karakter lainnya untuk mewujudkan generasi penerus yang berbudi luhur, toleran, senantiasan menghormati perbedaan, serta menjunjung tinggi semangat persatuan dan kesatuan sebagai langkah penguatan identitas nasional dalam menghadapi berbagai tantangan dan ancaman yang mebahayakan kehidupan bangsa dan negara.

Fenomena radikalisme di Indonesia merupakan ancaman nyata yang dapat memecah belah kondisi persatuan dan kerukunan masyarakat Indonesia. Maka dari itu dibutuhkan upaya kongrit dan terencana untuk menangkal perkembangan radikalisasi yang lebih besar. Salah satu upaya strategis yang dapat dilakukan adalah dengan menjadikan Perkuliahan PKn sebagai sarana pembentukan (internalisasi) nilai toleransi terhadap mahasiswa yang berguna sebagai filter awal untuk mencegah mahasiswa dapat dipengaruhi oleh berbagai narasi radikalisme yang kerap dibalut oleh gagasan cita-cita yang luhur dan sebuah perjuangan suci yang mengatas namakan suatu agama.

Disamping itu perkuliahan PKn merupakan saluran yang efektif yang dapat berfungsi sebagai bagian dari strategi kontra radikalisasi di lingkungan perguruan tinggi. Menurut Hakim strategi kontra radikalisasi, yaitu upaya penanaman nilai-nilai ke-Indonesiaan serta nilai-nilai non-kekerasan dalam menyelesaikan masalah menyikapi perbedaan. serta Prosesnya bisa dilakukan melalui pendidikan formal maupun informal, dan upaya-upaya lainnya. Strategi kontra radikalisasi ditujukan terhadap kelompok pendukung, simpatisan dan masyarakat yang belum terpapar paham radikal. Dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dijabarkan bahwa strategi

kontra radikalisasi diturunkan menjadi tiga, yaitu (a) kontra ideologi, (b) kontra narasi dan (c) kontra propaganda (Hakim, 2020)

Berdasarkan turunan strategi kontra radikalisasi sebagaimana disebutkan di atas. Adanya mata kuliah PKn sebagai mata kuliah dasar umum di Universitas Pendidikan Indonesia memiliki peranan yang strategis sekaligus sejalan dengan turunan strategi kontra radikalisasi. Melalui perkuliahan PKn mahasiswa dapat diberikan penguatan berkenaan dengan hakikat dan nilai-nilai dari Ideologi Pancasila sebagai landasan fundamen bangsa yang sesuai dengan karakter dan jatidiri masyarakat Indonesia, sebagai upaya kontra ideologi radikalisme.

Berikutnya peran perkuliahan PKn sebagai kontra narasi radikalisme yang identik dengan ujaran kebencian, ajakan memusuhi dan bertindak intoleran terhadap kelompok minoritas dapat dilakukan dengan menawarkan dan mengembangkan narasi pentingnya rasa saling menghargai dan menghormati di tengah keberagaman dan indahnya membina kerukunan dan persatuan di tengah berbagai perbedaan masyarakat Indonesia sesuai dengan semboyan negara Bhineka Tunggal Ika. Kontra Propaganda radikalisme dapat dilakukan dengan menjadikan mata kuliah PKn sebagai alat untuk mendesiminasikan pendidikan perdamaian dan wawasan kebangsaan yang sarat akan nilai-nilai penghargaan terhadap identitas nasional dan hak asasi manusia.

PKn merupakan salah satu dari Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) sebagaimana yang tercantum dalam UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Perguruan Tinggi pasal 135 ayat 3 yakni, Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat mata kuliah: a. agama; b. Pancasila; c. kewarganegaraan; dan d. bahasa Indonesia. MKWU merupakan mata kuliah fundamen yang memberikan landasan spiritual keagamaan, moral, kebangsaan, nasionalisme, dan sosial budaya dalam mengembangkan bidang ilmu dan keahliannya masing-masing (Rahim, 2018. Hlm. 17). Setiap MKWU juga ikut andil dalam pendidikan serta penanaman karakter terhadap mahasiswa. Salah satu MKWU yang memberikan penanaman karakter adalah Pendidikan Kewarganegaraan.

Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan mencakup tiga dimensi, yaitu dimensi pengetahuan *(knowledge)*, dimensi keterampilan *(skill),* dan dimensi nilai-nilai kewarganegaraan *(Value)*. Dimensi pengetahuan mencakup bidang politik, hukum, dan moral. Dimensi keterampilan meliputi keterampilan berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara misalnya berperan aktif untuk mewujudkan masyarakat madani, keterampilan memecahkan masalah-masalah sosial, mengadakan kerja sama dan mengelola konflik. Sedangkan dimensi nilai mencakup antara lain percaya diri, komitmen, pengusaan norma dan moral luhur, nilai keadilan, demokratis, toleransi, kebebasan individual dan perlindungan terhadap minoritas.

PKn di perguruan tinggi dapat diakatakan sebagai sumber nilai dan pedoman dalam pengembangan serta penyelenggaraan program studi guna mengantarkan mahasiswa memantapkan kepribadiannya sebagai manusia Indonesia seutuhnya dan memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur (Herlina, 2017). Upaya internalisasi nilai toleransi melalui perkuliahan PKn adalah tepat adanya dan sesuai dengan tujuan mendasar pembelajaran PKn yaitu mewujudkan warga negara yang baik, cerdas, dan bermoral (berkarakter) sesuai dengan nilai-nilai kepribadian bangsa (Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhineka Tunggal Ika). Penanaman nilai toleransi melalui perkuliahan PKn merupakan salah satu upaya dalam menangkal benih intoleransi di kalangan mahasiswa yang apabila diabaikan pandangan intoleran dapat berkembang menjadi gagasan radikalisme yang membenarkan berbagai aksi kekerasan terorisme. Penguatan dan optimalisasi mata kuliah PKn dalam menyemai nilai-nilai luhur bangsa khususnya nilai toleransi merupakan suatu upaya penting yang saat ini harus segera dilakukan, mengingat besarnya potensi ancaman radikalisme yang tersembunyi menyasar kehidupan mahasiswa di banyak perguruan tinggi.

Berdasarkan hasil penelitian, mahasiswa UPI menerangkan bahwasanya muatan materi yang terdapat dalam perkuliahan PKn secara praksis dan konseptual sangat berkorelasi dengan proses internalisasi nilai toleransi. Beberapa mahasiswa menyatakan bahwa melalui perkuliahan PKn yang

memuat materi pendidikan HAM, Hak dan Kewajiban Warga Negara, Demokrasi, dan Keberagaman dalam bingkai Bhineka Tunggal Ika. Melalui konten materi tersebut mahasiswa dapat lebih memahami pentingnya rasa saling mengharagi, menghormati perbedaan, dan menjaga persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Berkenaan dengan Pendidikan HAM, proses pendidikan yang diberikan dapat difokuskan pada pengajaran dan pemberian pemahaman kepada masyarakat terhadap toleransi antar masyarakat. Banyak hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya lembaga pendidikan yang memiliki kemampuan dan keunggulan dalam mengajarkan nilai-nilai toleransi secara cepat dan tepat (Budijanto & Rahmanto, 2021).

Sehubungan dengan hal di atas, materi-materi PKn yang terkait erat dengan upaya internalisasi nilai toleransi dapat juga dijadikan sebagai bagian dari kontra radikalisasi melalui strategi kontra narasi radikal terorisme. Menurut Schmid dalam Reppie mengemukakan bahwa "kontra narasi adalah upaya untuk menentang pesan ekstrimis dan kekerasan ekstrimis, baik secara langsung atau tidak langsung melalui berbagai sarana online dan offline". Dalam tulisan yang sama, Casebeer dan Rusell menjelaskan bahwa "cara yang paling efektif untuk melawan terorisme adalah dengan mengembangkan cerita yang lebih baik untuk menggantikan narasi kelompok teroris" (Reppie, 2016).

Kontra narasi sebagai turunan dari strategi kontra radikalisasi telah digunakan oleh banyak negara, salah satunya adalah Kanada. Menurut Martanto, dkk mengemukakan bahwa "pendekatan Pemerintah Kanada (2011) dalam laporan strategi counter terrorism menekankan pentingnya upaya menangkal ideologi terorisme dengan membentuk dan mereproduksi narasi-narasi tandingan, hal ini menjadi relevan daam menangkal narasi terorisme." Lebih lanjut, dijelaskan juga bahwa "counter terrorism harus diikuti dengan counter argument." (Martanto et al., 2019).

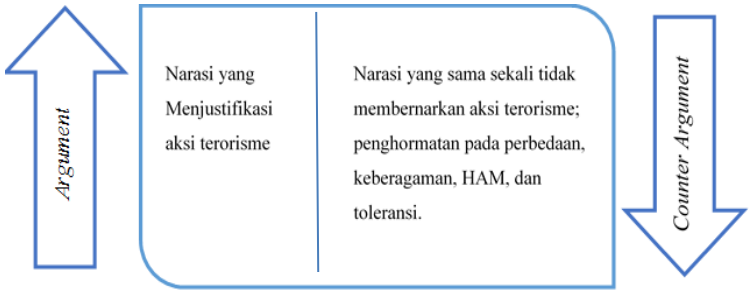

Gambar 1 : Narasi Terorisme dan Narasi Pembanding
Sumber: Martanto, dkk (2016. Hlm. 39)

Memperhatikan ilustrasi Murtanto, dkk pada Gambar 1 tersebut, narasi terorisme dan narasi pembanding sebagai *counter argument* terhadap berbagai *argument* dan narasi yang menjustifikasi pandangan radikalisme dan aksi terorisme. Secara umum perkuliahan PKn yang memiliki peranan sebagai pendidikan nilai karakter, pendidikan multikultural, dan wawasan kebangsaan memiliki posisi yang amat strategis dalam menyemai nilai-nilai toleransi dan berbagai narasi lainnya sebagai narasi pembanding gerakan radikal dan aksi terorisme.

Adapun beberapa upaya lain yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai hambatan dalam pelaksanaan internalisasi nilai toleransi untuk mencegah potensi radikalisme di perguruan tinggi diantaranya adalah (1) Kebijakan beasiswa dari Kampus, mengurangi kesenjangan diantara mahasiswa, (2) Penguatan melalui kolaborasi antar komponen di kampus dalam mengantisipasi gerakan radikalisme, (3) Mengedepankan internalisasi nilai berdasarkan figur teladan di mulai dari Dosen sebagai aktor utama proses internalisasi nilai toleransi di kelas, (4) Menyusun materi khusus urgensi nilai toleransi dan ancaman gerakan radikalisme yang dapat mengancam kedaulatan NKRI, (5) Menyelenggraan perkuliahan dan pelayanan kampus yang senantiasa mengedepankan pemenuhan hak

asasi manusia, dan perwujudan kehidupan kampus yang demokratis dan toleran terhadap kebhinekaan (keberagaman), (6) Melakukan kontra narasi terhadap berbagai narasi yang menjustifikasi aksi radikal terorisme, (7) Optimalisasi aplikasi yang mendukung proses pembelajaran selama pandemi.

Melalui berbagai pandangan dan pernyataan yang di kemukakan oleh mahasiswa, dosen PKn, dan pengamat radikalisme terhadap proses internalisasi nilai toleransi melalui perkuliahan PKn. Akan menjadi suatu masukan tersendiri dan pandangan yang cukup berharga berkenaan dengan respon dan pandangan mereka dalam memantau dan menyikapi potensi radikalisasi yang kerap tumbuh di tengah ligkungan perguruan tinggi dengan target atau sasaran utamanya adalah kalangan mahasiswa. Internalisasi nilai toleransi menjadi sebuah upaya yang begitu penting untuk dilakukan secara maksimal dan berkesinambungan. Terbentuknya nilai toleransi dalam diri seorang mahasiswa menjadi landasan berpikir yang vital dalam mempertimbangkan sikap atau perilaku apa yang akan mahasiswa lakukan dalam menghadapi fenomena radikalisme yang potensi kehadirannya begitu dekat ditengah kehidupan perkuliahan mereka.

Kesimpulan

Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi memiliki peranan yang besar dalam menginternalisasikan nilai toleransi terhadap setiap mahasiswa. Nilai toleransi dapat menjadi landasan fundamen karakter dan moral mahasiswa yang dapat melindungi mahasiswa dari berbagi pengaruh gerakan radikalisme yang identik dengan aksi intoleran dan terorisme. Perkuliahan PKn menjadi salah satu saluran strategis yang memiliki implikasi nyata dalam menangkal ancaman radikalisme di kalangan mahasiswa melalui materi-materinya yang memuat hak asasi manusia, pendidikan nilai, pendidikan mulikultural dan pendidikan wawasan kebangsaan. PKn mampu mendorong perwujudan kehidupan kampus di Universitas Pendidikan Indoneisa yang harmonis, solid, aman, nyaman, dan damai di tengah perbedaan dan keberagaman suku, Agama, ras, dan antar golongan.

Daftar Pustaka

Anggraeni, Darmawan, & Tanshzil. (2019). Revitalisasi Peran Perguruan Tinggi Dalam Menangani Gerak Radikalisme Dan Fenomena Melemahnya Bela Negara Di Kalangan Mahasiswa. *Jurnal Citizenhsip*, *2*(1), 35–40.

Azanella, L. A. (2021). *Bom Gereja Katedral Makassar: Kronologi Kejadian, Keterangan Polisi, dan Sikap Presiden*. Kompas.Com. https://www.kompas.com/tren/read/2021/03/29/100000165/bom-gereja-katedral-makassar-kronologi-kejadian-keterangan-polisi-dan-sikap?page=all.%0AAzanella, Penulis : Luthfia Ayu%0AKurniawan, Editor : Rendika Ferri%0ACepat:, Download aplikasi Kompas.com untuk

Azanella, L. A. 2018. ". (2018). *Inilah Deretan Aksi Bom Bunuh Diri di Indonesia*. Kompas.Com. https://nasional.kompas.com/read/2018/05/14/13533731/inilah-deretan-aksi-bom-bunuh-diri-di-indonesia?page=all

Bagir, Z. A. (2018). *Laporan CRCS: Alternatif Penanganan Masalah Penodaan Agama*.

Bogdan, R., & Biklen, S. K. (1998). *Qualitative Research for Education An introduction to theories and methods* (3rd ed.). Allyn and Bacon, Inc.

Budijanto, O. W., & Rahmanto, T. Y. (2021). Pencegahan Paham Radikalisme Melalui Optimalisasi Pendidikan Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Jurnal HAM*, *12*(1), 57. https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.57-74

Faela Nisa, Y. (2018). *Gen Z: Kegalauan Identitas Keagamaan*. Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN.

Hakim, R. Y. (2020). *Radikalisme Gaya Baru* (Azzamfa & G. R. Abdillah (eds.)). Daulat Press Jakarta.

Herlina, N. (2017). Pendidikan Kewarganegaraan dan Pancasila untuk Membangun Karakter Bangsa

Indonesia di Universitas PGRI Palembang Provinsi Sumatera Selatan. *Seminar Nasional 20 Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang*.

Humaizi, R. Hamdani Harahap, Ridwan Hanafiah, & Rudi Salam Sinaga. (2018). Pendayagunaan Kelompok Diskusi Mahasiswa Dalam Menangkal Paham Radikalisme Dan Paham Terorisme Di Lingkungan Perguruan Tinggi. *ABDIMAS TALENTA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *3*(1), 63–67. https://doi.org/10.32734/abdimastalenta.v3i1.2348

Ichwayudi, B. (2020). Dialog Lintas Agama Dan Upaya Menangkal Potensi Radikalisme Di Kalangan Pemuda. *Empirisma: Jurnal Pemikiran Dan …*, 41–52. https://www.jurnal.iainkediri.ac.id/index.php/empirisma/article/view/2160

Martanto, Ucu, Roikan, A. H., Febby, R., & Akhol, F. (2019). *Meredam Teror: Pencegahan Terorisme Dan Radikalisme Berperspektif HAM*. Yayasan Pusat Studi Hak Asasi Manusia (PUSHAM).

Moleong, L. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosda Karya.

Pahlevi, F. S. (2017). Eksistensi Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi Dalam Memperkokoh karakter Bangsa Indonesia. *Ibriez : Jurnal Kependidikan Dasar Islam Berbasis Sains*, *2*(1), 65–82. https://doi.org/10.21154/ibriez.v2i1.26

Qodir, Z. (2018). Kaum Muda, Intoleransi, dan Radikalisme Agama. *Jurnal Studi Pemuda*, *5*(1), 429. https://doi.org/10.22146/studipemudaugm.37127

Reppie, N. H. (2016). *Model kontra narasi terorisme dalam penanggulangan terorisme di Indonesia*. Universitas Indonesia.

Samsuri. (2011). *Pendidikan Karakter Warga Negara*. Diandra Pustaka Indonesia.

Suryani, T. (2017). Pengantar Memahami Fundamentalisme Islam dan Terorisme dan Deradikalisasi : *Jurnal Keamanan Nasional*, *III*(2), 271–294.

Sutton, M. (2006). Toleransi: Nilai Dalam Pelaksanaan Demokrasi. *Jurnal Demokrasi*, *5*(1), 53–60. http://ejournal.unp.ac.id/index.php/jd/article/view/1070

Syukri. (2009). Peran Pendidikan di Perguruan Tinggi terhadap Perubahan Perilaku Kaum Intelektual (sosial-Individu). *Jurnal Ilmiah Kreatif*, *6*(1).

Ubaedillah, A., & Abdul, R. (2013). *Pendidikan Kewarganegaraan: Pancasila, Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. Prenada Media Group.

Van Bruinessen, M. (2002). Genealogies of Islamic radicalism in post-Suharto Indonesia. *South East Asia Research*, *10*(2), 117–154. https://doi.org/10.5367/000000002101297035

Winataputra, U., & Budimansyah, D. (2007). *Civic Education: konteks, landasan, bahan ajar dan kultur kelas*. Prodi PKn SPS UPI.